

EVALUASI DOMAIN MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG BERDASARKAN PERMENPANRB NOMOR 59 TAHUN 2020

Annisa Dhea Pratiwi

NPP. 33.0313

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi
Pemerintahan

Email: annisadheapratiiwi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eem Nurnawati, SP, M.Si

Email: eem.nurnawati@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: This research is motivated by the imbalance in the achievement of the Electronic-Based Government System (SPBE) in the Pangkalpinang City Government, where the overall SPBE index reached 3.81 (very good category), while the Management Domain only obtained a score of 1.27 (poor category). This gap indicates that SPBE performance improvement has not been fully supported by the maturity of managerial functions and adequate ICT audit implementation. **Purpose:** This study aims to determine the maturity level of the SPBE Management Domain and formulate strategic recommendations based on PermenPANRB Number 59 of 2020. **Method:** This study employed a descriptive quantitative approach conducted at the Communication and Information Office of Pangkalpinang City. The population consisted of 33 regional government organizations (OPDs) that have implemented SPBE, while the sample was selected purposively from officials directly involved in SPBE management. Data were collected through closed questionnaires and documentation and analyzed using index calculations at the indicator, aspect, and domain levels. **Result:** The results showed that the SPBE Management Implementation Aspect obtained a score of 1.25 and the ICT Audit Implementation Aspect scored 1.33, resulting in an SPBE Management Domain index of 1.27 (poor category). Most indicators remained at maturity level 1, while only risk management, data management, and SPBE security audit indicators reached level 2. **Conclusion:** The low achievement of the SPBE Management Domain was caused by the absence of a structured management system and limited ICT audit implementation; therefore, strengthening governance and consistently implementing ICT audits are necessary to improve SPBE management in Pangkalpinang City.

Keywords: SPBE Evaluation; ICT Audit; Management Domain; Maturity Level; PermenPANRB

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Pangkalpinang, di mana indeks SPBE secara keseluruhan mencapai 3,81 dengan kategori sangat baik, sedangkan Domain Manajemen hanya memperoleh nilai 1,27 dengan kategori kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja SPBE belum sepenuhnya didukung oleh kematangan fungsi manajerial dan pelaksanaan audit TIK yang memadai. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan Domain Manajemen

SPBE serta merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Populasi penelitian terdiri dari 33 organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menerapkan SPBE, sedangkan sampel dipilih secara purposive dari pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan SPBE. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan perhitungan indeks pada tingkat indikator, aspek, dan domain. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek Pelaksanaan Manajemen SPBE memperoleh nilai 1,25 dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK memperoleh nilai 1,33, sehingga menghasilkan indeks Domain Manajemen SPBE sebesar 1,27 dengan kategori kurang. Sebagian besar indikator masih berada pada tingkat kematangan level 1, sementara hanya indikator manajemen risiko, manajemen data, dan audit keamanan SPBE yang mencapai level 2. **Kesimpulan:** Rendahnya capaian Domain Manajemen SPBE disebabkan oleh belum adanya sistem manajemen yang terstruktur dan masih terbatasnya pelaksanaan audit TIK, sehingga penguatan tata kelola dan pelaksanaan audit TIK secara konsisten diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan SPBE di Kota Pangkalpinang.

Kata kunci: Audit TIK; Domain Manajemen; Evaluasi SPBE; PermenPANRB; Tingkat Kematangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada era digital membawa transformasi signifikan dalam administrasi publik. Pemanfaatan TIK telah mengubah cara pemerintah mengelola data, mempercepat pelayanan publik, menekan biaya operasional, serta memperluas akses informasi kepada masyarakat (Arcellana, 2023). Transformasi ini mendorong terciptanya efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Namun, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan variasi hasil yang signifikan antarinstansi, mencerminkan tantangan dan kesiapan yang berbeda dalam penerapan digitalisasi pemerintahan (Irani et al., 2023)

Indonesia menindaklanjuti agenda transformasi digital melalui penerapan SPBE yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan ini diperkuat dengan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja digital secara berkala (BPK-RI, 2020). Mekanisme evaluasi ini mencakup seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan menilai tingkat kematangan penerapan SPBE, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.

Instrumen penilaian dalam PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 terdiri atas 47 indikator yang terbagi ke dalam 4 domain dan 8 aspek. Domain tersebut mencakup kebijakan internal, tata kelola, manajemen, serta layanan SPBE. Domain Manajemen SPBE memperoleh bobot penilaian sebesar 16,5% yang terdiri atas Aspek Penerapan Manajemen SPBE (12%) dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK (4,5%) (Darmawan & Dwiharto, 2019). Tingkat kematangan diukur menggunakan model yang mengadopsi prinsip Capability Maturity Model (CMM) dengan lima level, yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu-terukur, dan optimal (Alim et al., 2024)).

Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah yang menerapkan SPBE secara aktif. Berdasarkan Keputusan MENPANRB Nomor 663 Tahun 2024, Kota Pangkalpinang memperoleh indeks SPBE sebesar 3,81 dengan predikat Sangat Baik, meningkat dari 2,87 pada tahun 2023. Namun,

di balik pencapaian tersebut terdapat kelemahan serius pada Domain Manajemen yang hanya memperoleh skor 1,27 dengan kategori kurang, meningkat tipis dari 1,00 pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara capaian keseluruhan dengan kematangan fungsi manajerial internal.

Temuan ini konsisten dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024 yang menyebutkan adanya kendala pada keterbatasan SDM TIK, lemahnya fungsi audit, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal (Diskominfo, 2024). Penelitian Triadi dan Rizqi (2024)) juga menemukan bahwa rendahnya skor pada domain manajemen umumnya disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan manajemen SPBE yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada rendahnya capaian Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hasil evaluasi SPBE tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks SPBE Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 3,81 dengan predikat *Sangat Baik*, namun pada Domain Manajemen SPBE hanya memperoleh nilai 1,27 dengan predikat *Kurang*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara peningkatan indeks SPBE secara umum dengan kualitas pengelolaan manajemen SPBE yang masih rendah.

Rendahnya capaian Domain Manajemen SPBE dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, seperti belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, lemahnya pelaksanaan audit TIK, serta belum terintegrasinya pengelolaan layanan SPBE. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024 juga menunjukkan masih rendahnya pengembangan infrastruktur pendukung SPBE, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pengaturan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Irani et al (2023) bahwa hambatan sistem lama dan keterbatasan kapasitas SDM merupakan faktor utama yang menghambat transformasi digital di instansi pemerintah.

Penelitian mengenai penerapan SPBE sebelumnya telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Kota Yogyakarta, Kota Pontianak, Kota Tasikmalaya, Kota Singkawang, dan Kota Tangerang. Penelitian tersebut membahas evaluasi SPBE berdasarkan indikator PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020, tingkat kematangan SPBE, serta aspek tata kelola dan kebijakan SPBE. Penelitian terdahulu masih banyak menitikberatkan pada aspek teknis dan kebijakan SPBE secara umum. Kajian yang secara khusus membahas Domain Manajemen SPBE sebagai faktor utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan SPBE di pemerintah daerah masih terbatas. Pembahasan mengenai hubungan antara tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE dengan efisiensi birokrasi, pengelolaan sumber daya, koordinasi kelembagaan, serta pelaksanaan audit TIK juga belum dijelaskan secara mendalam.

Penelitian terkait Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Pangkalpinang juga masih jarang dilakukan. Kondisi tersebut menjadi alasan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 serta memberikan rekomendasi strategis sesuai kondisi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Domain Manajemen SPBE merupakan salah satu aspek utama dalam mendukung keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah. Domain manajemen berperan dalam mengatur proses pengelolaan risiko, keamanan informasi, pengelolaan data, sumber daya manusia, audit TIK, hingga pengelolaan layanan SPBE agar

pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan . Rendahnya nilai Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan SPBE yang dapat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.

Penelitian ini juga penting secara keilmuan karena kajian mengenai Domain Manajemen SPBE masih relatif terbatas dibandingkan penelitian SPBE secara umum. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek kebijakan, layanan digital, dan tata kelola SPBE secara luas, sedangkan penelitian yang secara khusus membahas tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE serta kaitannya dengan efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah masih belum banyak dilakukan, khususnya pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kondisi tersebut menyebabkan masih terbatasnya referensi akademik yang membahas pengelolaan manajemen SPBE secara mendalam berdasarkan indikator PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020.

Urgensi penelitian ini juga terlihat dari pentingnya penyediaan data dan gambaran empiris mengenai kondisi nyata penerapan Domain Manajemen SPBE di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah perbaikan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penguatan audit TIK, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan tata kelola SPBE yang lebih baik dan terintegrasi.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mengalami keterbatasan data dan informasi dalam memahami kondisi aktual Domain Manajemen SPBE yang sedang berjalan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses pengambilan kebijakan dan penyusunan strategi pengembangan SPBE menjadi kurang tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dampak lainnya yaitu pelaksanaan SPBE berpotensi mengalami hambatan dalam aspek koordinasi, pengelolaan layanan, keamanan informasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik menjadi kurang optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap Domain Manajemen SPBE telah dilakukan di beberapa daerah. Setiawan et al. (Setiawan Putra et al., 2022) meneliti implementasi SPBE di Kota Yogyakarta menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menemukan indeks Domain Manajemen SPBE sebesar 2,2 dengan predikat cukup, dengan kelemahan pada integrasi antar perangkat daerah dan manajemen data. Anjani (Anjani, 2023) menganalisis kapabilitas proses Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya dan menemukan bahwa kapabilitas proses masih berada pada level awal sehingga membutuhkan peningkatan kompetensi SDM dan regulasi pendukung. Triadi dan Rizqi (Triadi & Rizqi, 2024) mengevaluasi Domain Manajemen SPBE di Kota Singkawang dan menemukan tingkat kematangan masih berada pada level terdefinisi. Mawla et al (2025) meneliti efektivitas Domain Manajemen SPBE di Kota Pontianak dan menemukan rendahnya efektivitas akibat lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan SDM TIK, serta belum optimalnya audit TIK. Sulistiyanto et al. (2022) mengevaluasi Domain Manajemen SPBE Kota Tangerang dan mendapatkan indeks aspek 5 sebesar 3,00 dan aspek 6 sebesar 2,60 yang keduanya memperoleh predikat Baik, namun penelitian tersebut belum memberikan rekomendasi strategis secara spesifik terkait peningkatan Domain Manajemen SPBE.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebelumnya telah banyak dilakukan di berbagai daerah, seperti Kota Yogyakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan Kota Tangerang. Namun, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada

evaluasi SPBE secara umum, pengukuran tingkat kematangan, serta aspek kebijakan dan tata kelola SPBE. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dilihat dari konteks objek penelitian, fokus penelitian, serta pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada evaluasi Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020. Fokus tersebut dipilih karena Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Pangkalpinang masih memperoleh nilai rendah dibandingkan domain lainnya, yaitu sebesar 1,27 dengan predikat kurang.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus analisis yang tidak hanya menilai tingkat kematangan SPBE, tetapi juga mengkaji kondisi pengelolaan manajemen SPBE yang meliputi penerapan manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini menitikberatkan pada aspek manajemen risiko, keamanan informasi, pengelolaan data, pengelolaan SDM, manajemen layanan SPBE, serta audit TIK yang masih belum optimal di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan indikator penelitian yang mengacu pada indikator tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE dalam PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif untuk menilai tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE berdasarkan aspek penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK sehingga dapat memberikan gambaran kondisi aktual serta rekomendasi strategis yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasarkan data evaluasi terbaru,

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dipilih karena bertujuan mengukur, mengevaluasi, dan mendeskripsikan tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE melalui pengolahan data numerik. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan suatu fenomena secara sistematis menggunakan data angka dan teknik analisis statistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan memberikan gambaran faktual mengenai tingkat kematangan domain manajemen SPBE berdasarkan kriteria PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, khususnya pada Bidang Penyelenggaraan E-Government, selama bulan Januari 2026. Populasi penelitian adalah seluruh 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah menerapkan SPBE. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki pengetahuan, kompetensi, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan SPBE (Sugiyono, 2012). Sampel terdiri atas pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai honorer pada Bidang E-Government Diskominfo Kota Pangkalpinang.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan 11 indikator Domain Manajemen SPBE (indikator 21–31) dalam PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020, mencakup Aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE, indikator 21–28) dan Aspek 6 (Pelaksanaan Audit TIK, indikator 29–31). Kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 sesuai kriteria tingkat kematangan yang telah ditetapkan. Validitas isi instrumen dijaga melalui penilaian ahli (expert judgment). Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa dokumen resmi, peraturan, dan laporan evaluasi SPBE.

Analisis data dilakukan melalui perhitungan indeks pada tiga tingkatan. Pertama, indeks indikator diperoleh dari rata-rata jawaban responden per indikator yang diverifikasi dengan bukti dukung. Kedua, indeks aspek dihitung menggunakan rumus Indeks Aspek $n = 1/BA \times \text{Jumlah} (NI \times BI)$, di mana BA adalah bobot aspek, NI adalah nilai tingkat kematangan indikator, dan BI adalah bobot indikator. Ketiga, indeks domain dihitung menggunakan rumus Indeks Domain $n = 1/BD \times \text{Jumlah} (NA \times BA)$, di mana BD adalah bobot domain, NA adalah nilai indeks aspek, dan BA adalah bobot aspek. Hasil akhir diinterpretasikan berdasarkan klasifikasi predikat PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020: Memuaskan (4,2–5,0), Sangat Baik (3,5–<4,2), Baik (2,6–<3,5), Cukup (1,8–<2,6), dan Kurang (<1,8).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut menganalisis tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasarkan dua aspek utama, yaitu Penerapan Manajemen SPBE (Aspek 5) dan Pelaksanaan Audit TIK (Aspek 6), mengacu pada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020.

3.1. Penilaian Tingkat Kematangan Berdasarkan Indikator

Hasil evaluasi terhadap 11 indikator Domain Manajemen SPBE disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Penilaian Tingkat Kematangan Berdasarkan Indikator Domain Manajemen SPBE

No. Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot (%)
Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE			
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2	1,50
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1,50
23	Penerapan Manajemen Data	2	1,50
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1,50
25	Penerapan Kompetensi SDM SPBE	1	1,50
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1,50
27	Penerapan Manajemen Perubahan	1	1,50
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1,50
Aspek 6: Pelaksanaan Audit TIK			
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1,50
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1,50
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2	1,50

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1, dari sebelas indikator yang dievaluasi, sebagian besar masih berada pada tingkat kematangan level 1 (Rintisan). Hanya tiga indikator yang mencapai level 2 (Terkelola), yaitu indikator 21 (Penerapan Manajemen Risiko SPBE), indikator 23 (Penerapan Manajemen Data), dan indikator 31 (Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE). Ketiga indikator tersebut telah memiliki program kegiatan yang terarah dan terencana, meskipun belum sepenuhnya mengacu pada pedoman baku yang

komprehensif. Capaian level 2 pada indikator manajemen risiko didukung oleh adanya Peraturan Wali Kota (PERWAKO) tentang Pedoman Pengendalian Risiko, sementara manajemen data didukung oleh pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Adapun audit keamanan SPBE telah dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan Surat Keputusan Tim Audit Internal SPBE.

Delapan indikator lainnya masih berada pada level 1, yaitu Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (22), Penerapan Manajemen Aset TIK (24), Penerapan Kompetensi SDM SPBE (25), Penerapan Manajemen Pengetahuan (26), Penerapan Manajemen Perubahan (27), Penerapan Manajemen Layanan SPBE (28), serta Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (29) dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (30). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pada kedelapan indikator tersebut belum berlangsung secara optimal dan belum terstandarisasi, sehingga diperlukan langkah perbaikan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

3.2. Penilaian Tingkat Kematangan Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Tabel 2.

Penilaian Tingkat Kematangan Aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE)

No. Indikator	Nama Indikator	Nilai Tk. Kematangan	Bobot Indikator (%)	NI × BI (%)
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2	1,50	3,00
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1,50	1,50
23	Penerapan Manajemen Data	2	1,50	3,00
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1,50	1,50
25	Penerapan Kompetensi SDM SPBE	1	1,50	1,50
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1,50	1,50
27	Penerapan Manajemen Perubahan	1	1,50	1,50
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1,50	1,50
Jumlah (NI × BI)				15,00
Indeks Aspek 5 = $1/12 \times 15,00$				1,25

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Hasil pengolahan data pada Aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE) menunjukkan nilai indeks sebesar 1,25. Nilai tersebut berada dalam kategori kurang ($<1,8$). Kondisi ini menggambarkan bahwa implementasi manajemen SPBE di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara terstruktur dan terstandarisasi. Fungsi-fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi belum sepenuhnya terdokumentasi dalam kebijakan internal yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan temuan Anjani (2023) bahwa kapabilitas proses pada domain manajemen di pemerintah daerah umumnya masih berada pada level awal dan membutuhkan penguatan kompetensi SDM serta regulasi yang lebih menyeluruh.

3.3. Penilaian Tingkat Kematangan Aspek 6 – Pelaksanaan Audit TIK

Tabel 3.

Penilaian Tingkat Kematangan Aspek 6 (Pelaksanaan Audit TIK)

No. Indikator	Nama Indikator	Nilai Tk. Kematangan	Bobot Indikator (%)	NI × BI (%)
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1,50	1,50
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1,50	1,50
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2	1,50	3,00
Jumlah (NI × BI)				6,00
Indeks Aspek 6 = $1/4,5 \times 6,00$				1,33

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Nilai indeks Aspek 6 (Pelaksanaan Audit TIK) sebesar 1,33 juga berada dalam kategori kurang (<1,8). Pelaksanaan audit TIK belum berjalan secara sistematis dan konsisten. Proses audit yang dilakukan juga belum sepenuhnya mencakup seluruh tahapan, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil audit (Hujran et al., 2023). Hal ini menegaskan perlunya upaya perbaikan yang lebih terarah, khususnya dalam memperkuat tata kelola audit TIK dan mendorong konsistensi pelaksanaan audit secara berkelanjutan.

3.4. Penilaian Tingkat Kematangan Domain Manajemen SPBE

Tabel 4.
Penilaian Tingkat Kematangan Domain Manajemen SPBE

No. Aspek	Nama Aspek	Nilai Indeks Aspek	Bobot Aspek (%)	NA × BA (%)
5	Penerapan Manajemen SPBE	1,25	12,00	15,00
6	Pelaksanaan Audit TIK	1,33	4,50	5,98
Jumlah (NA × BA)				20,98
Indeks Domain 3 = $1/16,5 \times 20,98$				1,27
Kategori				Kurang

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai indeks Domain Manajemen SPBE diperoleh sebesar 1,27 yang termasuk dalam kategori kurang (<1,8). Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Manajemen SPBE belum berjalan secara optimal dan masih terdapat kelemahan dalam penerapan fungsi manajerial yang seharusnya. Hasil ini konsisten dengan hasil evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian (PANRB, 2024) bahwa Domain Manajemen merupakan domain dengan capaian terendah di antara keempat domain SPBE.

3.5. Perbandingan Hasil Evaluasi Tahun 2022 dan 2024

Tabel 5.

Perbandingan Hasil Evaluasi Domain Manajemen SPBE Tahun 2022 dan Tahun 2024

No.	Indikator / Aspek / Domain	Tahun 2022	Tahun 2024
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	2
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1
23	Penerapan Manajemen Data	1	2
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Penerapan Kompetensi SDM SPBE	1	1
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	2
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1,00	1,25
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	1,00	1,33
Domain 3	Manajemen SPBE	1,00	1,27

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Perbandingan antara hasil evaluasi tahun 2022 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan pada tiga indikator, yaitu manajemen risiko (1→2), manajemen data (1→2), dan audit keamanan SPBE (1→2). Peningkatan ini mendorong kenaikan indeks Aspek 5 dari 1,00 menjadi 1,25 dan Aspek 6 dari 1,00 menjadi 1,33, sehingga indeks Domain Manajemen SPBE meningkat dari 1,00 menjadi 1,27. Meskipun peningkatan tersebut mengindikasikan adanya upaya perbaikan yang mulai memberikan dampak positif, selisih kenaikan yang relatif kecil menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan belum sepenuhnya optimal.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Setiawan (2022) yang menemukan bahwa domain manajemen SPBE pada pemerintah daerah umumnya menunjukkan capaian lebih rendah dibandingkan domain lainnya akibat belum optimalnya integrasi antarperangkat daerah dan lemahnya manajemen data. Sama halnya dengan temuan Mawla et al. (2025) bahwa rendahnya capaian domain manajemen di Kota Pontianak disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan keterbatasan SDM TIK, kondisi serupa juga ditemukan di Kota Pangkalpinang, di mana LKJIP Diskominfo (2024) mencatat belum optimalnya koordinasi dan keterbatasan SDM TIK sebagai faktor penghambat utama.

Berbeda dengan temuan Sulistiyanto (2022) di Kota Tangerang yang berhasil mencapai predikat Baik pada kedua aspek domain manajemen (aspek 5: 3,00 dan aspek 6: 2,60), Kota Pangkalpinang masih jauh dari capaian tersebut. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan kapasitas SDM, dukungan infrastruktur TIK, dan kematangan kelembagaan antara kedua kota ((Irani et al., 2023). Temuan Anjani (2023) bahwa proses kapabilitas pada domain manajemen umumnya membutuhkan

peningkatan kompetensi SDM dan regulasi yang lebih komprehensif juga relevan dengan kondisi di Kota Pangkalpinang.

Secara keseluruhan, rendahnya indeks Domain Manajemen SPBE Kota Pangkalpinang mencerminkan kondisi yang bersifat sistemik, bukan sekadar persoalan teknis. Ketiadaan SOP yang menyeluruh, belum adanya strategi manajemen yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, serta pelaksanaan audit TIK yang belum terprogram secara konsisten, merupakan akar permasalahan yang harus diselesaikan secara komprehensif (Irani et al., 2023)

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa meskipun Kota Pangkalpinang telah memiliki Peta Rencana SPBE 2024–2029 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE sebagai fondasi kebijakan, implementasi operasional pada level manajemen masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan (policy framework) dengan pelaksanaan di lapangan (implementation gap). Temuan ini memperluas perspektif bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga oleh kapasitas manajerial dan kesiapan sumber daya dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut (Al-ansi et al., 2024)

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Pangkalpinang masih berada pada kategori kurang dengan nilai indeks sebesar 1,27. Aspek Penerapan Manajemen SPBE memperoleh nilai indeks 1,25, sedangkan Aspek Pelaksanaan Audit TIK memperoleh nilai 1,33. Sebagian besar indikator masih berada pada level 1 atau tahap rintisan dan hanya beberapa indikator yang mencapai level 2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Domain Manajemen SPBE di Pemerintah Kota Pangkalpinang masih belum berjalan optimal. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh belum tersusunnya sistem manajemen yang terstruktur, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan audit TIK yang belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan (Nartin, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu melakukan perbaikan pada setiap indikator Domain Manajemen SPBE melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih lengkap, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan pelaksanaan audit TIK secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE sehingga pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada evaluasi domain manajemen SPBE di satu instansi (Diskominfo Kota Pangkalpinang) dan hanya mencakup satu periode evaluasi. Hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh OPD di Kota Pangkalpinang maupun untuk daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara longitudinal perkembangan tingkat kematangan domain manajemen SPBE, memperluas cakupan ke seluruh OPD di Kota Pangkalpinang, serta membandingkan hasil evaluasi dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang beserta seluruh jajaran Bidang E-Government yang telah memberikan kesempatan, data, dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih pula kepada Ibu Eem Nurnawati, SP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi, serta kepada seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-ansi, A. M., Garad, A., Jaboob, M., & Al-ansi, A. (2024). Heliyon Elevating e-government : Unleashing the power of AI and IoT for enhanced public services. *Heliyon*, 10(23), e40591. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40591>
- Alim, F. F., Dewi, F., & Gumilang, S. F. S. (2024). Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Sebagai Strategi Pengembangan Smart Village Pada Dimensi Village Service (Entrepreneurship). *Jipi (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 889–904. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.4730>
- Anjani, D. (2023). Analisis Kapabilitas Proses pada Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya Berdasarkan. *Jurnal Media Infotama*, 19(1), 2023.
- Arcellana, C. (2023). Transformative Power of ICT in Government Operation : Modernizing Public Administration, 1–2. <https://doi.org/10.35248/2315-7844.23.11.401>
- BPK-RI. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, 53(9), 1689–1699.
- Diskominfo. (2024). LKJLP DISKOMINFO TAHUN 2024, 167–186.
- Hujran, O., Khalifa, S., Zayed, B., Ain, A., & Box, P. O. (2023). Analysing e-government maturity models Ayman Alarabiat Mohammed AlSuwaidi, 19(1), 1–21.
- Irani, Z., Abril, R. M., Weerakkody, V., Omar, A., & Sivarajah, U. (2023). The impact of legacy systems on digital transformation in European public administration : Lesson learned from a multi case analysis. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101784. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101784>
- Mawla, M. F., Mulyadi, D. M., & SP, M. S. (2025). *EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK*. eprints.ipdn.ac.id. Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/22928/>
- Nartin, S.E., M.SI, Faturrahman, S.E., M.Ak, Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., CBA, Dr. Yuniawan Heru Santoso, S.E., S.Sos., M. S. (2024). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- PANRB, K. (2024). Laporan Evaluasi SPBE 2024, 17, 302.
- Setiawan Putra, D., Selo, S., & Fauziati, S. (2022). Evaluasi Domain Manajemen Spbe Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(1), 54–61. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i1.4265>
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono, P. D. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd, Ed.), *Alfabeta cv* (kedua). ALFABETA, cv I Hotline: 081.1213.9484 TT. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373 Website: www.cvalfabeta.com Email: alfabetabdg@yahoo.co.id.
- Sulistiyanto, B., Sutejo, I., & Firmansyah, G. (2022). *Proceedings of the First Mandalika International*

Multi-Conference on Science and Engineering 2022, MIMSE 2022 (Informatics and Computer Science). Proceedings of the First Mandalika International Multi-Conference on Science and Engineering 2022, MIMSE 2022 (Informatics and Computer Science). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-084-8>

Triadi, H. A., & Rizqi, I. N. (2024). Evaluasi Tingkat Kematangan Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Singkawang. *Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.*

Trilestari, E. W., Dwiputrianti, S., Anwar, S., Birowo, C. T., & Istanti, D. (2023). Implementation of E-Government in Accelerating Bureaucratic Reform in Indonesia. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_33

Verzeni, R., & Law, C. (2012). Competition Law in the Digital Economy. *Digital Policy Review*, (February), 85–98.

Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Raja Grafindo Persada.

